



# LAPORAN PELAKSANAAN

*Peluncuran Portal Sustainable Development Goals (SDGs)  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

Tangerang Selatan - Banten  
28 Juni 2021



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



## **LAPORAN PELAKSANAAN**

### **BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

### **PELUNCURAN PORTAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Kamis, 19 Agustus 2021  
Tangerang, Banten

---

#### **I. PENDAHULUAN**

Dunia saat ini masih berkebutakan dengan penanganan pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tapi juga berakibat pada krisis sosial dan ekonomi. Selain itu, pandemi ini juga telah menyebabkan pelambatan pembangunan global yang telah ditargetkan melalui agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs). Dalam konteks ini, upaya pemulihan pandemi dan pencapaian SDGs sangat relevan untuk dijadikan prioritas. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga diperlukan kontribusi tiap elemen suatu negara termasuk lembaga parlemen.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi payung hukum pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan progress pencapaian TPB melalui dokumen VNR (*Voluntary National Review*) 2021 kepada Dewan Ekonomi Sosial PBB yang ketiga kalinya setelah menyampaikan laporan serupa pada 2017 dan 2019.

Namun demikian, sebagai upaya untuk meningkatkan peran parlemen dalam percepatan pembangunan SDGs, maka DPR RI memandang perlu untuk membuat suatu pusat data dan informasi SDGs dalam bentuk Portal SDGs. Keberadaan Portal SDGs DPR RI ini akan berfungsi sebagai referensi bagi anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terkait pelaksanaan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan peluncuran Portal SDGs ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam upaya mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## A. SUSUNAN DELEGASI

| No. | NAMA                             | FRAKSI     | JABATAN                                                          |
|-----|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Azis Syamsuddin<br>(A-282)       | F-Golkar   | Wakil Ketua DPR RI<br>Bidang Koordinator<br>Politik dan Keamanan |
| 2.  | Dr. Fadli Zon<br>(A-86)          | F-Gerindra | Ketua BKSAP                                                      |
| 3.  | Dr. Sihar Sitorus<br>(A-139)     | F-PDIP     | Wakil Ketua BKSAP                                                |
| 4.  | Putu Supadma Rudana<br>(A-563)   | F-PD       | Anggota BKSAP                                                    |
| 5.  | Mardani Ali Sera<br>(A-422)      | F-PKS      | Anggota BKSAP                                                    |
| 6.  | Hafisz Thohir<br>(A-487)         | F-PAN      | Anggota BKSAP                                                    |
| 7.  | Efendi Sianipar<br>(A-144)       | F-PDIP     | Anggota BKSAP                                                    |
| 8.  | Irine Y.R. Putri<br>(A-262)      | F-PDIP     | Anggota BKSAP                                                    |
| 9.  | Puteri Komaruddin<br>(A-295)     | F-GOLKAR   | Anggota BKSAP                                                    |
| 10. | Singgih Januratomoko<br>(A-305)  | F-GOLKAR   | Anggota BKSAP                                                    |
| 11. | Himmatul Aliyah<br>(A-78)        | F-GERINDRA | Anggota BKSAP                                                    |
| 12. | Hasbi Anshori<br>(A-355)         | F-NASDEM   | Anggota BKSAP                                                    |
| 13. | Heru Widodo<br>(A-55)            | F-PKB      | Anggota BKSAP                                                    |
| 14. | Ema Ummiyatul Chusnah<br>(A-471) | F-PPP      | Anggota BKSAP                                                    |

## B. AGENDA PROGRAM

Berikut adalah program acara peluncuran Portal SDGs DPR RI:

| THURSDAY, 19 AUGUST 2021                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 – 2.10 pm WIT/<br>9 – 9.10 a.m CET           | Opening                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.10 – 2.30 pm WIT /<br>9.10 – 9.30 a.m. CET   | <u>Remarks</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hon. Mr. Sihar Sitorus</b>, Chair of SDGs Taskforce<br/>Vice chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation</li><li>• <b>Hon. Dr. Fadli Zon</b><br/>Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation</li></ul> |
| 2.30 – 3 pm WIT/<br>9.30 – 10 am CET           | <u>Keynote Speakers</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mr. Martin Chungong</b><br/>Secretary General of the Inter Parliamentary Union (IPU)</li><li>• <b>Hon. Dr. Ir H Suharso Monoarfa</b><br/>Minister of National Development Planning</li></ul>                                |
| 3 – 3.20 pm WIT /<br>10 – 10.20 a.m. CET       | <u>Launch of SDGs Dashboard</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>H.E. Dr. Aziz Syamsuddin</b><br/>Vice Speaker of the House of representatives of the Republic of Indonesia</li></ul>                                                                                                |
| 3.20 – 3.30 pm WIT/<br>10.20 – 10.30 am<br>CET | Closing                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## II. JALANNYA PELAKSANAAN ACARA

Jalannya acara terbagi menjadi tiga sesi yaitu sesi pernyataan atau remarks oleh Dr. Sitorus sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) SDGs DPR RI dan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Dr. Fadli Zon sebagai Ketua BKSAP. Sesi kedua diisi oleh pembicara utama yaitu Mr. Martin Chungong sebagai Sekretaris Jenderal Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Dr. Ir. H. Suharso Manoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan. Terakhir, peluncuran Portal SDGs yang diresmikan langsung oleh Dr. Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI.

## A. Kata Sambutan

### 1. Dr. Sihar Sitorus (Ketua Panja SDGs BKSAP / Wakil Ketua BKSAP)

Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan besar yang disebabkan pandemi Covid-19. Seiring dengan itu, investasi jangka panjang melalui pembangunan berkelanjutan sangat penting dalam rangka memperkuat ketahanan sosial. Dalam waktu yang relatif singkat, pandemi ini memperluas krisis dari hanya krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan sosial. Hingga saat ini sudah lebih dari 100 juta orang kehilangan pekerjaan dan ratusan juta orang kelompok rentan dan ekonomi lemah semakin terpuruk. Dalam kondisi seperti ini, pencapaian SDGs harus kembali diakselerasi sebagai kerangka kerja dalam memulihkan pembangunan secara inklusif, setara, dan terintegrasi.

Dalam merespons tantangan ini, parlemen memegang posisi yang strategis untuk mempengaruhi kebijakan dan penganggaran yang terintegrasi antara penanganan pandemi dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya SDGs di antara anggota-anggota parlemen supaya dapat turut serta mendorong pencapaian 17 tujuan SDGs melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi.



**Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP memberikan sambutan secara virtual**

Salah satu strategi yang dijalankan adalah melalui penilaian SDGs secara mandiri (SDGs Self-Assessment) yang bekerjasama dengan IPU. Langkah ini dimaksudkan

sebagai upaya untuk mengukur kesiapan parlemen dalam pencapaian SDGs, membantu parlemen dalam mengidentifikasi praktik baik, peluang, dan bagaimana mengarusutamakan SDGs dalam proses legislasi.

Dalam upaya mencapai itu, maka DPR RI meluncurkan Portal SDGs yang berfungsi sebagai platform yang menyediakan informasi seputar SDGs. Diharapkan platform ini dapat memandu anggota parlemen dalam menjalankan fungsinya sekaligus mendorong percepatan pencapaian SDGs di Indonesia. Dengan adanya Portal SDGs ini, diharapkan anggota parlemen dapat terbantu dalam proses legislasi, sinkronisasi prioritas pembangunan nasional serta menyusun rekomendasi pencapaian SDGs dalam relasinya dengan konstituen.

## **2. Dr. Fadli Zon (Ketua BKSAP)**

Krisis akibat pandemi Covid-19 telah melanda seluruh dunia dan tentunya menyebabkan terganggunya upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam berbagai sektor mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Pandemi ini juga menguji pentingnya kerja-kerja multilateralisme dimana tidak ada negara yang mampu menangani pandemi ini secara mandiri. Oleh karena itu, solidaritas dan persatuan sangat diperlukan agar mampu menjadi prinsip dalam upaya menyelamatkan kehidupan manusia, mencegah ekonomi lebih terpuruk, serta proses pemulihan paska pandemi.



**Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP memberikan kata sambutan**



Sebagai elemen utama sistem kenegaraan, parlemen bertanggungjawab atas perumusan kebijakan dan alokasi anggaran untuk percepatan pencapaian SDGs. Selain itu, parlemen juga mempunyai fungsi akuntabilitas terhadap kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan terkait SDGs termasuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam berbagai proses kebijakan. Fungsi ini sejalan dengan target SDGs 2030 yang menempatkan parlemen di posisi yang sangat strategis.

Sebagai juru diplomasi antar parlemen, BKSAP DPR RI mempunyai komitmen yang kuat terhadap upaya mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke konteks parlemen. Tujuannya adalah untuk memastikan anggota parlemen dan seluruh staf dibekali dengan pengetahuan dan sumber daya untuk mendukung implementasi, monitoring, dan evaluasi pencapaian SDGs. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2017, BKSAP menginisiasi pertemuan global tentang SDGs bertema *“World Parliamentary Forum on Sustainable Development”* yang juga dilaksanakan pada tahun 2019. BKSAP DPR RI juga bekerjasama dengan IPU untuk penyelenggaraan pertemuan global tentang pencapaian SDGs yaitu *“Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs”* pada bulan September 2021.

Selain itu, dalam upaya memperkuat peran parlemen terkait SDGs, maka parlemen harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi terutama dari konstituen. Parlemen juga harus menyadari keberadaan legislasi tentang SDGs dan pencapaian SDGs di negara-negara lain sebagai bahan pendampingan. Oleh karena itu, semua informasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam suatu platform yang dinamakan Dashboard SDGs. Keberadaan Portal SDGs ini diharapkan mampu mendorong adanya inovasi, memperkuat kolaborasi di dalam sistem parlemen.

## **B. Pembicara Utama**

### **1. Mr. Martin Chungong (Secretary-General of the IPU)**

Mr. Martin Chungong mengawali presentasinya dengan menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan global. Hal ini sangat patut diapresiasi dan sangat sejalan dengan spirit yang dibangun Inter-Parliamentary Union (IPU). IPU merupakan representasi parlemen global yang selalu berupaya untuk tujuan perdamaian dunia, demokrasi, kerjasama internasional, dan kesejahteraan.

Apresiasi perlu disampaikan kepada parlemen-parlemen di dunia yang telah berhasil menjadikan SDGs sebagai suatu agenda politik pada level lokal, regional, dan global. Pelaksanaan pertemuan parlemen global tentang pencapaian SDGs yang akan dilakukan atas kerjasama DPR RI dengan IPU pada akhir bulan depan

merupakan momentum yang tepat untuk mengecek kemajuan pencapaian SDGs dan juga menyusun agenda-agenda politik yang diperlukan untuk mengejar defisit target SDGs 2030.

Sekarang merupakan saat yang tepat bagi parlemen untuk meningkatkan aksi-aksi terhadap pencapaian SDGs dan menyadari bahwa SDGs perlu diinstitutionalisasi dan dimainstreaming ke dalam proses legislasi. Pemerintah merupakan aktor utama yang bertanggungjawab terhadap pencapaian SDGs, namun demikian realisasi dari target-target tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa kontribusi aktor non pemerintah termasuk parlemen dan masyarakat sipil.

Parlemen Indonesian telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempromosikan pencapaian SDGs. Ini merupakan hal penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas yang mana parlemen dapat mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan mengevaluasi langsung dampaknya terhadap masyarakat global. Pertanyaan pentingnya adalah apakah parlemen telah menggunakan prinsip people-center dalam proses perumusan kebijakan. Dalam hal ini, SDGs tidak dapat diimplementasikan dalam konteks kosong tapi harus diimplementasikan dengan mengetahui aspirasi masyarakat karena parlemen merupakan representasi warga negara.

Peluncuran platform digital dalam bentuk Dashboard SDGs akan memberikan akses terhadap informasi-informasi yang berbentuk *real-time* dan akurat serta mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Portal ini juga sangat penting untuk menelusuri progres pencapaian SDGs dan memastikan apakah kita sudah berada pada jalur yang tepat. Peluncuran SDGs ini juga menjadi momentum bagi parlemen untuk meningkatkan kontribusi komunitas terhadap implementasi SDGs dan akuntabilitas.

Peluncuran portal ini dapat dijadikan sebagai praktik baik yang perlu didesiminasikan ke tempat. IPU sangat berkomitmen terhadap pencapaian SDGs dan terus berkomitmen untuk mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengakselerasi pencapaian SDGs. IPU berharap ada kerjasama yang lebih kuat dengan DPR RI dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs.

## **2. Dr. Ir. H. Suharso Manoaifa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas)**

Menteri Bappenas menyampaikan kembali informasi bahwa SDGs merupakan bentuk komitmen Indonesia bersama dengan 193 negara-negara lain sejak September 2015. SDGs juga merupakan bentuk upaya harmonisasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang inklusif. Kemajuan di suatu sektor pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari pembangunan sektor lain.



Pembangunan SDGs mengedepankan prinsip-prinsip universal yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia sehingga mampu memberi manfaat kepada semua orang khususnya kelompok rentan melalui prinsip inklusif. SDGs melibatkan semua pihak termasuk 4 platform kemitraan: pemerintah dan parlemen, pelaku usaha dan filantropi, akademisi dan masyarakat sipil. Penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparansi menjadi kunci utama pelaksanaan SDGs mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terutama dalam penganggaran.

Keterlibatan semua pihak termasuk DPR merupakan suatu perkembangan yang positif. Parlemen memiliki peran sangat strategis dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Peran itu antara lain memperkuat kebijakan dan dukungan regulasi bagi SDGs, serta dukungan pengawasan dan penganggaran serta monitoring pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Implementasi SDGs membutuhkan kemauan politik yang kuat agar menjadi komitmen semua pihak. Perpres menekankan pengarusutamaan SDGs di berbagai level dan juga merupakan panduan implementasi SDGs yang kuat agar menjadi gerakan bersama. Pengarusutamaan SDGs ke dalam pembangunan antara lain diwujudkan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah mengintegrasikan 124 target yang meningkat dari 94 target pada periode RPJMD sebelumnya.

Menteri Bappenas juga memaparkan bahwa Indonesia telah mencapai laporan progres capaian SDGs sebanyak 3 kali yaitu dalam dokumen VNR yang diserahkan ke PBB pada 2017, 2019, dan 2021. Laporan SDGs merupakan laporan penting hasil monitoring dan evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk Dashboard SDGs yang akan terus disempurnakan seiring dengan proses digitalisasi.

Pandemi Covid-19 tentu berdampak besar terhadap pencapaian SDGs karena banyak target-target global yang terganggu seperti *trend* angka kemiskinan yang meningkat. Presiden mengintruksikan bahwa target SDGs tidak perlu diturunkan. Untuk memenuhi target2 SDGs yang ambisius tersebut membutuhkan tambahan dana 2,5 menjadi 4,2 triliun dollar pertahun. Peta jalan SDGs 2020-2030 awalnya pendanaan sebesar 67 T namun setelah pandemi dibutuhkan tambahan 14 T menjadi 81 T.

Strategi pendanaan SDGs tidak hanya bertumpu pada pendanaan pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan inovatif baik secara finansial maupun non finansial. Bappenas telah menyiapkan kerangka SDGs Financial Hub agar pencapaian SDGs lebih sistematis dan efektif, maka peran parlemen menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan. Langkah DPR membentuk portal sangat patut diapresiasi. Menteri Bappenas menegaskan bahwa Platform diharapkan akan mampu mendorong kolaborasi dan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.

### III. PELUNCURAN PORTAL SDGs DPR RI

#### **Dr. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam**

Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dr. Azis Syamsuddin pertama-tama menegaskan komitmen parlemen dalam bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menuju SDGs yang sudah dicanangkan tahun 2030. Peluncuran ini diharapkan menjadi media kerjasama yang baik. Parlemen Indonesia berusaha untuk mempercepat dan berusaha untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Semoga pandemi tidak mengganggu ekonomi dan aktivitas di seluruh dunia. Artinya, pencapaian SDGs harus tetap dilanjutkan meskipun masih pandemi. Dr. Azis mengajak semua pihak untuk yakin bahwa tujuan-tujuan global yang dicanangkan pada 2030 ini akan tercapai.

Enam tahun sejak disetujuinya target pembangunan berkelanjutan, negara-negara di dunia telah berupaya meningkatkan upaya-upaya dalam mencapai 17 target pembangunan global. Dalam mewujudkan dunia yang inklusif, sejahtera, dan damai, parlemen turut serta dalam proses implementasi SDGs. Meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi prospek pembangunan global sangat positif diharapkan dunia akan mampu bersama-sama mewujudkan target tersebut.



**Dr. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI meresmikan Portal SDGs DPR RI.**

Dr. Azis juga menyebut BKSAP perlu diapresiasi sebagai lembaga yang terus aktif menjalankan fungsi-fungsinya meskipun dalam kondisi pandemi. Diharapkan DPR melalui BKSAP bisa menjadi mitra kerjasama dengan pemerintah. Peluncuran

Portal SDGs di DPR RI merupakan platform online pertama yang menjadi pusat informasi dan data mengenai SDGs dan kerja-kerja DPR dalam memastikan ketercapaian SDGs. Platform ini diharapkan bisa mendorong penguatan kontribusi parlemen dalam mencapai target SDGs di Indonesia.

Selanjutnya Dr. Azis Samsyuddin meresmikan Portal SDGs DPR RI.

#### IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan acara peluncuran Portal SDGs DPR RI berjalan lancar dan sesuai dengan program acara yang telah disusun. Dari semua presentasi dapat disimpulkan dua poin berikut:

- DPR RI akan terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan melalui platform SDGs digital. Kolaborasi dengan pemerintah dan empat pilar pembangunan SDGs lainnya akan terus dilakukan.
- DPR RI melalui BKSAP juga akan terus aktif dalam berbagai kolaborasi internasional yang ditujukan pada percepatan pembangunan berkelanjutan.
- Portal SDGs DPR RI dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas DPR dan anggota DPR RI terhadap data dan informasi SDGs sebagai dasar perumusan kebijakan, pengawasan, dan penganggaran.



Delegasi DPR RI yang hadir pada peluncuran portal SDGs.

## V. PENUTUP

### A. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*

### B. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan dalam rangka mengikuti sidang virtual *Peluncuran Portal Sustainable Development Goals (SDGs) Portal DPR RI* pada tanggal 19 Agustus 2021. Dokumen mengenai sidang akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 24 Agustus 2021

a.n. Ketua Delegasi,  
Kepala Biro KSAP dan OI



Endah T.D. Retnoastuti  
NIP. 196804021993022001

---

# TERM OF REFERENCE

---



**TERM OF REFERENCE**  
**PELUNCURAN PLATFORM DIGITAL SDGS PARLEMEN INDONESIA**  
**Peningkatan Internalisasi dan Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan**  
**Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) di DPR RI**

**Latar Belakang**

Parlemen adalah salah satu aktor utama dalam mendorong dan memastikan tercapainya TPB/SDGs di tingkat nasional, khususnya melalui tiga fungsi konstitusional yang dimilikinya—penganggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah selaku pelaksana kebijakan nasional terkait TPB/SDGs. Peran parlemen juga sangat krusial dalam upaya mendorong pencapaian TPB/SDGs yang *people-centered* melalui fungsi representatif, mendorong pembangunan yang berpusat pada masyarakat, serta mampu mencerminkan dan responsif terhadap kebutuhan konstituennya.

DPR RI sebagai badan legislatif nasional berdasarkan kesepakatan dalam Deklarasi Hanoi pada tahun 2015 juga memiliki peran untuk:<sup>1</sup>

1. Mendukung implementasi tujuan–tujuan yang terkandung dalam TPB/SDGs melalui penyusunan legislasi yang sinergis dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
2. Mendukung diseminasi dan lokalisasi kebijakan–kebijakan terkait TPB/SDGs untuk publik pada tingkat nasional dan daerah.
3. Meminta dan mendorong pertanggungjawaban pemerintah yang telah melaksanakan kebijakan–kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan TPB/SDGs.

Meskipun demikian, peran dan sinergi parlemen dengan program – program SDGs masih belum terlihat dalam Lembaga DPR RI. Upaya parlemen masih minim dalam mendukung sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan TPB/SDGs, di sisi lain DPR RI juga kurang dilibatkan dalam TPB/SDGs yang ditandai dengan tidak dilibatkannya DPR RI dalam kemitraan multi-pihak TPB/SDGs di Indonesia. Pemahaman mengenai pentingnya percepatan pencapaian TPB/SDGs, bahkan urgensi terkait agenda global ini masih tergolong lemah di lembaga DPR RI. Berbagai rekomendasi hasil sidang, bahkan target dan indikator TPB/SDGs belum banyak dipahami dan digunakan secara sinergis dalam pembahasan produk legislasi dan program terkait.

Dalam upaya mendukung diseminasi informasi TPB/SDGs parlemen baik internal maupun eksternal, serta mendukung fungsi pengawasan parlemen dalam TPB/SDGs, perlu adanya suatu sistem informasi yang mengumpulkan berbagai data dan informasi parlemen terkait pelaksanaan dan pengawasan TPB/SDGs di Indonesia. Salah satu wujud system informasi ini adalah dalam membentuk **Platform Digital SDGs di Parlemen** yang terbuka, *real time* dan informatif.

---

<sup>1</sup> Inter Parliamentary Union. (1 April 2015). *Hanoi Declaration-Sustainable Development Goals: Turning Words Into Action*. Diakses pada 16 April 2021 dari <http://archive.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm>

Platform Digital ini menyajikan informasi dan data terkait fungsi – fungsi DPR RI dalam Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan SDGs. Berbagai informasi terkait legislasi yang berlangsung terkait SDGs, kegiatan-kegiatan DPR RI baik internal maupun dengan konstituen di daerah pemilihan dan laporan – laporan DPR terkait SDGs akan dikemas dalam visualisasi yang menarik dan bisa diakses untuk semua. Platform digital ini akan membuka akses bagi masyarakat untuk memastikan apakah implementasi SDGs sudah dilaksanakan berdasarkan pemantauan DPR RI dan juga akan menjadi jaringan untuk berbagi pembelajaran praktik – praktik baik SDGs melalui **Forum Community of Practices** dari berbagai mitra – mitra yang terlibat dalam parlemen baik di luar negeri maupun di daerah.

DPR RI akan mengadakan kegiatan “**Peluncuran Platform Digital SDGs Indonesia**”. Kegiatan ini ditunjukkan kepada seluruh lingkungan parlemen dan masyarakat luas. Diharapkan parlemen dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari informasi – informasi yang telah dikumpulkan dan disajikan untuk pelaksanaan SDGs ini, sehingga akan semakin memperkuat kesadaran dan pemahaman mengenai berbagai isu dan program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Platform Digital ini juga bisa menjadi salah satu alat berbagi pengetahuan dan sumber data dalam persiapan Indonesia akan jadi tuan rumah **The First Global Parliamentary Conference** on Achieving The SDGs pada tanggal 28-30 September 2021 dan menuju Indonesia 2030.

### **Tujuan**

1. Meluncurkan dan membahas Platform Digital SDGs Parlemen Indonesia.
2. Mendiskusikan praktek baik (*best practices*) Parlemen dalam mendukung pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan TPB/SDGs.



---

# BAHAN PAPARAN

---



## **REMARKS**

**H.E. Dr. Azis Syamsuddin**

**Vice Speaker of the Indonesian House of Representatives**

**“Launching Sketsa Dashboard SDGs DPR RI”**

*Excellency,*

*Honourable Member of Parliaments,*

*Ladies and Gentlemen,*

It has been six years since the adoption of the Sustainable Development Goals (SDGs). Every nation in the world, including Indonesia, has accelerated efforts through commitments and actions to achieve the whole 17 (seventeen) goals by the year 2030.

In an effort to create a just and inclusive world, which emphasize on people, planet, prosperity, peace, and partnership; parliaments have accelerated their efforts and engaged in the process of the SDGs implementation.

However, the Covid-19 pandemic has created disruptive consequences for the world's economies and its societies, which also has impact toward the achievement of the Sustainable Development Goals.

Despite all challenges that arise due to the COVID-19 pandemic, I am optimistic that we can achieve these global goals together. I believe that to strengthen these goals, we need to deepen an inclusive participation with all stakeholders, which includes government, civil society, and the intellectual academics.

Parliaments have a major role in enacting legislation, budgeting, and monitoring SDG implementation. Although the Executive is mandated to implement measures to achieve the global goals, the government must always involve parliament in national development planning, including how the SDGs agenda is incorporated and reflected.

This year, The House of Representatives of the Republic of Indonesia, in collaboration with the IPU, will organize the 1<sup>st</sup> Global Parliamentary Conference on Achieving the

SDGs. This is our continued commitment in the implementation of SDGs action plans within the work of parliaments. We can use inter-parliamentary networks and dialogues on sustainable development to preserve people's voices heard at global forums.

Finally, I would like to use this opportunity to proudly introduce and launch “SDGs Dashboard of Indonesian Parliament” – the first online platform at the parliament, which will provide information and data on the SDGs and the work of parliament in ensuring the attainment of Sustainable Development Goals.

This platform, I believe, will assist parliamentarians in improving strategies for identifying and prioritizing interventions through our parliamentary roles, which will drive progress toward achieving the SDGs in Indonesia.

Thank you, and warm regards from the people of Indonesia.



## **REMARKS**

**Hon. Dr. Fadli Zon**

**Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation**

**“Launching Sketsa Dashboard SDGs DPR RI”**

***Excellency,  
Honourable Member of Parliaments,  
Ladies and Gentlemen,***

First, I would like to thank our speakers for attending today’s event, virtually or physically. Your excellency Dr. (H.C) Suharso Monoarfa, Minister of National Development Planning, Dr. Aziz Syamsudin, Vice Speaker of the Indonesian House of Representatives, Mr. Martin Chungong, IPU Secretary General and my colleague, Dr. Sihar Sitorus. The presence of Minister of Indonesia National Development Planning, shows government acknowledgement on the role of parliament in strengthening the SDGs.

As the core element of governance system of a country, parliaments are responsible to ensure the evidence-based and transparent budget allocations on SDGs, providing accountability for government-led policy and law implementation on SDGs, and integrating people voices throughout the processes. This has also been strengthened in the 2030 Goals which acknowledged the essential role of parliaments in driving the achievement of SDGs.

***Excellency,  
Honourable Member of Parliaments,  
Ladies and Gentlemen,***

The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation which acts as the focal point of parliamentary diplomacy of Indonesian Parliament is committed to promote 2030 Global Goals into the parliamentary context, by assuring that parliamentarians and staff members are equipped with the necessary knowledge and resources to support the implementation, monitoring, and evaluation of the SDGs.

In 2017, The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of Indonesian Parliament initiated the first global parliamentary forum discussing SDGs namely “World Parliamentary Forum on Sustainable Development” and continued until 2019 consecutively. And next month, jointly organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU), we will hold “*Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs*”. We hope that all of these efforts could enhance collaboration in strengthening commitments and actions to achieve SDGs by 2030.

***Excellency,  
Honourable Member of Parliaments,  
Ladies and Gentlemen,***

In order to perform our parliamentary roles related to SDGs, parliaments should be supported and well-informed with the data and information, especially those from the constituents. In addition to that, parliamentarians should also be aware of the existing legislation related to SDGs in Indonesia – while it is also important to have the references from other national parliaments about SDGs achievement in other countries. All of this information will be found in the “SDGs Dashboard” online platform that we will launch today.

In his presidential state address this year, President Joko Widodo emphasized the important role of DPR in conducting community aspirations and continue to supervise the implementation of government programs through innovations. This platform, which we will launch today, is our continued innovation, as parliament continues to conduct parliamentary oversight of the SDGs implementation and improving public participation. Through this platform, I hope that awareness can be raised, innovation can be fostered, and collaboration can be enhanced within our parliamentary system. To conclude, I am confident that we will get through the crisis– with SDGs as the guiding reference for our efforts to build back stronger. We have dreams to realise and goals to reach for. Each of us has a role to play in achieving SDGs by 2030. So let us play our part and make sure we all recover together.

Thank you.



## **REMARKS**

**Hon. Dr. Sihar Sitorus**

**Chair of SDGs Taskforce**

**Vice Chair of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation**

**“Launching Sketsa Dashboard SDGs DPR RI”**

***Excellency,***

***Honourable Member of Parliaments,***

***Ladies and Gentlemen,***

Today, we are facing the challenges due to COVID-19 pandemic which do not only change the way we live, but also remind us on the importance of investment in sustainable development which could build greater resilience in the society.

In a very short time, the pandemic has evolved from a public health emergency into and economic and social crisis. It has also caused 114 million people to lose their jobs over 2020 which disproportionately hurt vulnerable groups and low-income households in many countries. To this end, the Sustainable Development Goals (SDGs) could be our roadmap to recover better and stronger as it provides a robust and clear framework ensuring inclusiveness, equality, and equity for all by taking a concrete, interconnected, and integrated action.

Despite the pandemic, Indonesia has participated in delivering our third report on the implementation of SDGs in Indonesia at the Voluntary National Review (VNR) 2021, highlighting our reforms on (1) Industry recovery, tourism, and investment toward Green Economy, (2) Disaster resilience system, (3) National health system, and (4) Social protection system.

In specific, the national poverty level decreased from 11,13% in 2015 to 9,22 in 2019, but then increased to 10,19% in 2020 due to the pandemic. In response to this situation, Indonesia has increased social protection expenditure rate from 12,3% in 2019 to 12,7% in 2020 into the national expenditure budget. Concerning health system, the National Health Insurance has covered 222,5 million people (82,51%) of the population in 2020, but unmet needs for healthcare has increased from 4,66% in 2015 to 5,44% in 2020. All of these situations are the wake-up call for strengthening health and social protection systems to be more resilient so that no one left behind.

Crisis due to COVID-19 also reminds us on the importance of integrating the economic, social, and environmental dimensions as the key to achieve sustainable development towards sustainable recovery. Investment towards the green economy, supported by low-carbon development, will therefore strengthen our efforts for a green recovery protecting the environment, slowing climate change, and reducing the threat of future pandemics. With less than 10 years to achieve the Global Goals, it is critical for governments and all stakeholders involved to accelerate the progress to achieve SDGs targets by effectively mainstreaming the targets and enhancing coordination for better and more inclusive SDGs implementation.

***Excellency,***

***Honourable Member of Parliaments,***

***Ladies and Gentlemen,***

In response to these challenges, parliaments are in a strategic position to influence policies and budgets to ensure that COVID-19 pandemic responses and strategies embrace and incorporate the Sustainable Development Goals (SDGs) which is due in 2030. And of course, we must begin by building and increasing greater awareness about SDGs to the respective Member of Parliaments in order to better support the attainment of 17 Goals of SDGs through law-making, budgeting, oversight, and representation functions of parliament.



In this regard, the establishment of SDGs Task Force in Indonesian Parliament is aimed at enhancing the engagement and participation of parliamentarians in the achievement of SDGs at the national level, and promoting the whole targets of SDGs to our constituents, and ensuring the targets to be incorporated into the national development plan.

One of our strategies is through conducting *SDGs Self-Assessment*, in collaboration with the Inter-Parliamentary Union (IPU), aiming at evaluating parliaments' readiness to engage on the SDGs, and further helping parliamentarians to identify good practices, opportunities, and lesson learned on how to mainstream SDGs into the legislative process.

And today, we are glad to introduce the “SDGs Dashboard of Indonesian Parliament” or *Dashboard SDGs DPR RI* which hopefully could guide our parliamentarians to effectively drive and ensure the attainment of SDGs in 2030. This platform will provide us information related to SDGs such as SDGs implementation in legislation process, synchronization of regional development planning priorities, and recommendations on the implementation of SDGs in constituents.

In conclusion, I hope our meeting today could pave way to strengthen our commitments and seize the opportunity to accelerate the achievement of SDGs in Indonesia.

I thank you.

---

# LIPUTAN MEDIA

---

# BKSAP Luncurkan Portal SDGs DPR RI

19-08-2021 / B.K.S.A.P.



*Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (dua dari kanan) saat meluncurkan portal Sustainable Development Goals (SDGs), Kamis (19/8/2021). Foto: Azka/Man*

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI meluncurkan portal *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peluncuran *platform* ini penting sebagai upaya parlemen memusatkan perhatian pembangunan pada masyarakat. Peran parlemen sangat krusial dalam mendorong pencapaian TPB (SDGs) ini.

DPR RI diharapkan mampu mendorong pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Tidak hanya itu, DPR RI juga mampu responsif terhadap kebutuhan konstituennya. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam siaran persnya, Kamis (19/8/2021) mengatakan, peluncuran ini ditunjukkan bagi lingkungan parlemen dan masyarakat luas.

"Diharapkan parlemen dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan dan disajikan untuk pelaksanaan SDGs ini, sehingga akan semakin memperkuat kesadaran dan pemahaman mengenai berbagai isu dan program pembangunan berkelanjutan di Indonesia," jelas Fadli.

Fadli menjelaskan, *platform* digital ini bisa menjadi salah satu alat berbagi pengetahuan dan sumber data dalam persiapan Indonesia menjadi tuan rumah The First Global Parliamentary Conference on Achieving The SDGs pada 28-30 September 2021 dan menuju Indonesia 2030.

Peran dan sinergi parlemen dengan program-program SDGs dinilai belum terlihat dalam lembaga DPR. Upaya parlemen masih minim dalam mendukung sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan SDGs. Di sisi lain, DPR RI juga kurang dilibatkan dalam SDGs yang ditandai dengan tidak dilibatkannya DPR dalam kemitraan multi-pihak SDGs di Indonesia.

"Pemahaman mengenai pentingnya percepatan pencapaian TPB/SDGs, bahkan urgensi terkait agenda global ini masih tergolong lemah di DPR. Berbagai rekomendasi hasil sidang, bahkan target dan indikator TPB/SDGs belum banyak dipahami dan digunakan secara sinergis dalam pembahasan produk legislasi dan program terkait," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Dalam konteks inilah, BKSAP DPR mendesain sistem informasi yang mengumpulkan berbagai data dan informasi parlemen terkait pelaksanaan dan pengawasan TPB/SDGs di Indonesia. Salah satu wujud sistem informasi ini adalah membentuk portal SDGs di parlemen yang terbuka, real time, dan informatif. Portal digital ini bisa di akses di laman web [sdgs.dpr.go.id](http://sdgs.dpr.go.id) yang menyajikan informasi dan data terkait fungsi-fungsi DPR RI dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan SDGs.

"Berbagai informasi terkait legislasi yang berlangsung terkait SDGs, kegiatan DPR RI baik internal maupun dengan konstituen di daerah pemilihan dan laporan-laporan DPR terkait SDGs akan dikemas dalam visualisasi yang menarik dan bisa diakses untuk semua. Portal ini akan membuka akses bagi masyarakat untuk memastikan apakah implementasi SDGs sudah dilaksanakan berdasarkan pemantauan DPR RI," jelas Fadli. (azk/sf)



# Peluncuran Portal SDGs Jadi Pembuktian untuk Indonesia Lebih Maju

20-08-2021 / B.K.S.A.P.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (kanan) di sela-sela peluncuran portal SDGs di Tangerang, Banten, Kamis (19/8/2021). Foto: Azka/Man

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah pembuktian untuk membangun Indonesia dan dunia lebih maju. Segala sumber daya dan segala cara harus digunakan untuk mewujudkannya. Maka dari itu, DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) meluncurkan portal SDGs yang dapat diakses melalui laman [sdgs.dpr.go.id](http://sdgs.dpr.go.id) sebagai upaya parlemen memusatkan perhatian pembangunan pada masyarakat.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera di sela-sela peluncuran portal SDGs di Tangerang, Banten, Kamis (19/8/2021) mengatakan, peluncuran portal digital ini untuk mengetahui kondisi akurat rakyat secara *real time* dan bisa ditangan, <sup>Dark</sup> cepat sesuai kondisi di masing-masing daerah.

"Melalui portal ini dapat memantau kondisi masyarakat di masing-masing daerah secara realtime, ketika masyarakat merasakan dampaknya mereka bisa langsung merespon dan berikan informasi, kita yang membuat legislasi anggaran dan pengawasan bisa langsung menindaklanjutinya karena itu sangat substansial peluncuran portal SDGs ini," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengimbau kepada sesama Anggota DPR RI untuk meramaikan dan mengoptimalkan portal SDGs ini. Selain itu, masyarakat pun bisa menjadikan portal ini sebagai jembatan untuk memberikan saran untuk Anggota DPR RI terkait kendala atau masukan di daerahnya masing-masing. Karena peluncuran portal digital SDGs ini agar seluruh elemen bersatu, sehingga semua juga harus menyuksekannya.

"Dengan peluncuran *platform* ini seluruh teman-teman di DPR RI bisa mengoptimalkan portal digital ini. Dan masyarakat bisa menjadikan ini jembatan untuk memberikan saran masuk untuk seluruh anggota legislator. Dan seluruh elemen harus bersatu demi sukseskan SDGs ini," tutup Mardani. **(azk/sf)**



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.